

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

MARLINA

06 096 025



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



No. Alumni Universitas	Marlina	No. Alumni Fakultas
------------------------	---------	---------------------

a). Tempat/Tgl.lahir: Padang, 02/11/1983 b). Nama Orang Tua: Helmi dan Maryam
 c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096025 f).
 Tgl.Lulus: 25 Agustus 2009 g) Predikat Lulus:h). IPK:i)
 Lama Studi : 32 bulan k) Alamat orang tua: Padang Besi RT 03 RK 01 No. 45
 Padang

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat**
 Tugas Akhir DIV oleh Marlina.
 Pembimbing 1. Anda Dwi Haryadi, SE. Ak., 2. Endrawati, SE. M.Kom. Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat. Data yang diambil sebagai sampel bersumber dari realisasi APBD tahun 2004 - 2006 pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan metode analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh masing-masing variable independen terhadap Belanja Daerah, sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah secara serentak. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan pengaruhnya positif, DAU juga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Agustus 2009.
 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Ferdawati, SE. MSc. Ak	Sukartini, SE.M.Kom. Ak	Irda Rosita, SE. M.Eng. Ak	Anda Dwi Haryadi, SE. Ak

Mengetahui:
 Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE. MM. Ak
 Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendaftarkan Nomor Alumnus.

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 merupakan titik awal berlakunya Otonomi Daerah, sebagai reformasi pemerintah daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, kewenangan yang luas, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah (Halim, 2004: 2).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan

kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Maulida ; 2007).

Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin untuk belanja operasional, pengeluaran untuk belanja organisasi maupun pengeluaran untuk pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran (Suhanda ; 2007). PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. DAU menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan DAK menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Ketergantungan pada transfer pusat dari tahun ke tahun harus

semakin diatasi. Rumindanga (2005) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan, yaitu:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan pemerintahan lokal yang lebih efisien.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan sumber pendanaan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah. Seharusnya sumber pendanaan tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian sebelumnya. Rumondang (2005) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Barat" tahun 2003-2005. Hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja pemerintah daerah. Maulida (2007) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah." (studi kasus pada kabupaten/kota di Indonesia). Hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sulistyawan (2005), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Beda penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti melakukan penelitian pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Sumatera Barat, dan data yang diambil adalah data time series yaitu data tahun 2004-2006. Pada penelitian Maulida, Rumondang dan Sulistyawan hanya memasukkan dua variabel bebas mempengaruhi variabel Belanja Daerah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menambah satu variabel lagi yaitu variabel bebas DAK, karena DAK salah satu bahagian dana perimbangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah: apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan data yang digunakan adalah untuk 3 tahun (2004, 2005 dan 2006) yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) propinsi Sumatera Barat, yakni data PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Hasil pengujian Hipotesis H1 membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis H2 membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis H3 membuktikan bahwa H_a ditolak, karena hasil penelitian DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
4. Jika dilakukan uji secara bersama-sama variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota propinsi Sumatera Barat. Ini membuktikan hipotesis H4 bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah tidak dapat diterima, atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yang mungkin masih terdapat variabel-variabel lain yang merupakan faktor penting dalam manajemen keuangan dan penganggaran daerah. Keterbatasan-keterbatasan studi ini adalah:

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

1. Penelitian ini menggunakan sampel hanya terbatas pada Kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat sehingga daya generalisasi penelitian ini rendah.
2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan Tiga variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah yaitu PAD dan DAU dan DAK sehingga bagi peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah (misalnya, bagi hasil pajak, pinjaman dll)
3. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk). Sehingga tidak dapat memberikan inferensi mengenai faktor-faktor pemoderasi dan kontinjensi. Studi mendatang dapat memasukkan faktor-faktor ini.

5.3. Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak atau cakupannya seperti mengambil sampel pada semua propinsi di Sumatera.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang tahun penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
3. Perlu diperhatikan bagi pemerintah propinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat berangsur-angsur dapat dikurangi.

DAFTAR REFERENSI

- BPS. 2004. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat*. Penerbit Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.
- BPS. 2005. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat*. Penerbit Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.
- BPS. 2006. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat*. Penerbit Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFEE.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta. 2002
- Maulida, Novi. 2007. *Pengaruh PAD dan DAU terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Romondang, Widya. 2005. *Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat*. Padang.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Andalas Lima Sisi. Padang.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta.
- Sulistiyawan, Eko. 2005. *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera*. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.